



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ADI SOEPRIJANTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **545529**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.440.000.000

1. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/55 m2 di KAB / KOTA  
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI  
Rp. 190.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA  
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 623.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T Tahun 2018, LAINNYA Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA ZENIX HYBRID Q Tahun 2022, HASIL  
SENDIRI Rp. 618.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 705.243.460**F. HARTA LAINNYA** Rp. 583.500.000**Sub Total** Rp. 4.351.743.460**III. HUTANG** Rp. 240.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.111.743.460

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.